

## ABSTRACT

*The analysis of this research is about how local government, in this case the Government of Malang City, response the threat of ISIS as a global terrorism. The result of this field research found that, the Government of Malang City in responding ISIS is integrating persuasive and repressive approach. The persuasive approach is held with various efforts of socialization to society and the repressive approach held by arrest ISIS supporters who have been proven to committing crime. Then, to collect information about ISIS network, invasive or proactive approach was done by the intelligence networks under Kominda. Furthermore, to response ISIS, there are synergies between public actors in every level and private actors that refer as implementation of hybrid security governance model. This hybrid security governance is relevant with the concept of local governance, that public actor (government) can not handle the ISIS threat by themselves so it needs involvement of private actors. Besides, the responses are relevant with government action in higher level that shows the whole-of-government and comprehensive approach to defeat ISIS as threat for global peace and international security.*

**Keywords:** *ISIS, local government, security governance*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemerintah lokal, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang, merespons ancaman terorisme global ISIS. Hasil penelitian lapangan ini menemukan bahwa dalam merespons ancaman ISIS, Pemkot Malang mengintegrasikan pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pendekatan represif dengan melakukan penangkapan terhadap anggota ISIS yang telah terbukti melakukan tindak pidana berupa makar. Untuk mengumpulkan informasi mengenai jaringan ISIS, pendekatan invasif atau proaktif dilakukan melalui jaringan intelijen yang diwadahi Kominda. Selanjutnya, dalam merespons ISIS, aktor publik di berbagai level dan aktor privat saling sinergis yang menunjukkan implementasi dari model *hybrid security governance*. *Hybrid security governance* tersebut sejalan dengan konsepsi *local governance* bahwa ancaman ISIS tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah (aktor publik) sehingga membutuhkan keterlibatan aktor privat. Selain itu, respons tersebut sejalan dengan sikap pemerintah di level lebih tinggi yang menunjukkan *the whole-of-government approach* dan *comprehensive approach* dalam merespons ISIS sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.

**Kata-Kata Kunci:** *ISIS, pemerintah lokal, security governance*